

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejarah mencatat bahwa Asia Tenggara termasuk dalam kepentingan Amerika Serikat selaku pimpinan Blok Barat dalam menghadapi komunisme. Rashad Herman (2010, hlm. 55) mengatakan bahwa tujuan strategis Pakta SEATO (South East Asia Treaty Organization) yang dibentuk pada tahun 1954 oleh Amerika, Inggris, dan Perancis memiliki tujuan strategis untuk membendung ekspansi ataupun berkembangnya pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, telah dibentuk ANZUS (Australia, New Zealand, and the United States) untuk kawasan Pasifik Selatan, dengan tujuan yang sama. Jadi, apabila ada bentrok terhadap Malaysia maka pasukan militer Australia yang ditempatkan di daerah tersebut akan membantunya, begitupun dengan diperbantukannya pasukan dari New Zealand dan Amerika Serikat.

Menurut Abdullah Makhmud Hendropriyono (2013, hlm. 39-40) untuk menyelesaikan persengketaan antara Philipina dengan Inggris maka diadakanlah pertemuan di Manila dari tanggal 30 Juli sampai 5 Agustus 1963, yang dihadiri Tengku Abdul Rahman dari Malaya, Diosdado Macapagal dari Philipina, dan Soekarno dari Indonesia. Ketiga pemimpin Negara-negara tersebut akhirnya menyetujui konsep MAPHILINDO (Malaya, Philipina, dan Indonesia) tentang Persetujuan Manila dan akan bekerjasama secara trilateral untuk mendukung berdirinya Malaysia. Tapi satu syarat mutlak harus dipenuhi, yakni pembentukannya kelak harus dilandasi pada kemauan rakyat Kalimantan Utara itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh pernyataan bahwa "...Presiden Soekarno menghimbau berdirinya MAPHILINDO yang netral dari pengaruh blok imperialis dan komunis serta non Pakta militer, ketiga kepala pemerintahan setuju..." (Herman, 2010, hlm. 55).

Namun pada tanggal 16 September 1963, Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaya akhirnya dengan dukungan Inggris membentuk Federasi Malaysia yang meliputi: Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah (Herman, 2010, hlm. 55). Baskarata T. Wardaya (2008, hlm. 294) mengemukakan bahwa lebih jauh Inggris mengusulkan supaya penggabungan lima wilayah bekas kolonialnya di Asia Tenggara itu menjadi sebuah federasi yang dinamakan Federasi Malaysia. Mereka berharap

bahwa dengan memasukan Singapura ke dalam Federasi Malaysia akan dicegahlah kota-pulau itu dari kemungkinan eksploitasi Cina komunis melalui penduduknya yang mayoritas keturunan Cina.

Pada awalnya Indonesia tidak berkeberatan dengan rencana federasi tersebut meskipun koloni-koloni Kerajaan Inggris itu banyak yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan. Namun pada awal Desember 1962, Indonesia mengubah sikapnya atas masalah ini, dari mendukung peleburan menjadi menentangnya. Meskipun Inggris dapat dengan mudah memadamkannya, bagi Indonesia pemberontakan yang dilakukan Brunei menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat di bekas koloni Inggris menerima usulan peleburan mereka ke dalam Federasi Malaysia. Lebih jauh lagi, bagi Indonesia pemberontakan tersebut lebih dari sekadar suatu penolakan terhadap rencana pembentukan federasi, melainkan bagian dari upaya menentang rekayasa kolonial. (Wardaya, 2008, hlm. 294-296). Didukung juga oleh pernyataan bahwa pemicunya yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh A. M. Azahari, Pimpinan Partai Rakyat Brunei yang menentang rencana federasi dan menyatakan pendirian Negara Kesatuan Kalimantan Utara (NKKU) atau Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) pada 8 Desember 1962 (Hendropriyono, 2013, hlm. 47). NNKU diproklamirkan meliputi daerah-daerah Serawak, Brunei, dan Sabah. Selain itu juga Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) dibentuk sebagai kekuatan pertahanan NKKU (Soemadi, 1974, hlm. 53).

Menurut pandangan Indonesia, terbentuknya NKKU merupakan suatu bentuk gerakan nasionalisme yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Pemerintah Indonesia mendukung gerakan Azahari tersebut dan memberi peluang bagi NKKU untuk menyusun kekuatan dengan mengambil basis di wilayah Indonesia, yaitu Kalimantan Barat (Soemadi, 1974, hlm. 53-54).

Di daerah lain, seperti Persekutuan Tanah Melayu (PTM), Singapura dan Sarawak juga terdapat partai-partai politik yang tidak setuju dengan pembentukan Malaysia, diantaranya dapat disebutkan: Labour Party, Partai Rakyat dan Sosialis Front dari PTM; Singapura Congres, Partai Rakyat Singapura, Labour Party dari Singapura; Sarawak United People Party (SUPP) dari Sarawak (Vinco, 2009, hlm. 1-2).

Untuk menumpas NKKU itu, Inggris menerjunkan pasukan penumpas yang terdiri dari satu Resimen Gurka, satu batalyon Queen's Highlanders, satu batalyon The Green Jacket dan satuan Commando. Kekuatan pasukan penumpas bertambah solid

dengan masuknya pasukan dari Australia dan New Zealand, di samping pasukan dari Inggris yang terus bertambah untuk melawan gerilyawan Tentara Nasional Kalimantan Utara (Hendropriyono, 2013, hlm. 47). Hal tersebut mengakibatkan Azahari tidak mampu mempertahankan pemerintahan pusat di Kalimantan Utara. Kemudian pemerintahan pusat NKKU dipindahkan ke Manila (Vinco, 2009, hlm. 4).

Dalam bukunya Koentjaraningrat (1979, hlm. 118) yang berjudul *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, James Danandjaja berpendapat bahwa :

Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga setelah pulau Tanah Hijau (Greenland) dan pulau Irian. Sebagai akibat kolonialisme Barat pulau itu kini terpecah menjadi 3 wilayah dari tiga Negara, yaitu bekas jajahan Inggris di Utara menjadi wilayah Malaysia dan Kesultanan Brunei, sedangkan bekas jajahan Belanda di Selatan menjadi wilayah Republik Indonesia.

Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan bahwa "...secara politis, pulau-pulau itu membentuk bagian dari Republik Indonesia kecuali bagian utara Kalimantan yang merupakan koloni Britania..." (Vlekke, 2008, hlm. 6). Maka dari itu, wilayah antara Indonesia dengan Malaysia menjadi sangat penting, terutama mengenai konflik di perbatasan kedua negara tersebut.

Menurut Soemadi (1974, hlm. 54) Partai Komunis Sarawak (PKS) juga telah mendapat tekanan oleh penguasa setelah pemberontakan Azahari, dan karena itu sejalan dengan kebijaksanaan politik Indonesia waktu itu pemimpin-pemimpin komunis itu Hijrah ke Kalimantan Barat. Di sisi lain, menurut M. S. Mitchel Vinco (2009, hlm. 4-5), RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dalam rangka menyelamatkan Partai Komunis Sarawak mengirimkan Wen Min Chyuan dan Wong Kee Chok (Bong Kee Chok) ke Kalimantan Barat pada awal tahun 1963. Kedua pemimpin Partai Komunis Cina tersebut menemui Yap Chung Ho, Wong Ho (Bong Hon), Liem Yen Hwa dan Yacob dari Sarawak Advance Youth Association (SAYA) untuk membahas garis perjuangan dari Partai Komunis Sarawak.

Para pejuang kemudian mengadakan pertemuan di Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 1963. Menurut M. S. Mitchel Vinco (2009, hlm. 4-5), dalam pertemuan itu telah diputuskan untuk membentuk pasukan bersenjata yang akan berkedudukan di perbatasan Kalimantan Barat (Asuangsang di sebelah Utara Sambas). Ketika itu mereka menyepakati gagasan Bong Kee Chok untuk membentuk Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS). Suplai senjata untuk PGRS akan dipasok oleh TNKU yang

akan berusaha mendapatkannya dari pihak Republik Indonesia. Dari pertemuan Sintang berlanjut ke pertemuan Bogor, antara Perdana Menteri A. M. Azahari dan Ketua Partai Komunis Sarawak (PKS) Wen Min Chyuan dengan menlu RI/Kepala Badan Pusat Intelijen Dr. Subandrio dan Wakil Komite Sentral PKI (CC PKI), Nyoto (Hendropriyono, 2013, hlm. 54).

Menurut M. S. Mitchel Vinco (2009, hlm. 5-6) tindak lanjut dari kesepakatan di Bogor, Soebandrio dengan BPI (Badan Pusat Intelijen) Indonesia, membantu melatih 10 (sepuluh) orang anak buah Yap Chung Ho selama sebulan di Bogor. Sepuluh orang yang telah dilatih oleh BPI kemudian langsung dibawa ke Asuangsang untuk melatih 60 orang pasukan lagi. Dengan basis pasukan ini, kemudian oleh SUPP “pelarian” di Kalimantan Barat dibentuklah Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) sebagai bagian dari Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). Selain itu juga memasukkan anggota-anggota PGRS yang dipimpin Saleh sebagai anggota BPI. Dislokasi umum mereka adalah dari Pantai Barat sampai daerah Sungkung ditempati PGRS dan dari Sungkung sampai Benua Martinus di sebelah Timur ditempati PARAKU (Vinco, 2009, hlm. 6). Menurut A. M. Hendropriyono (2013, hlm. 55), anggota PGRS merupakan sempalan anggota SUPP yang nonkomunis. SUPP sejatinya adalah partai politik kaum nasionalis yang keberadaannya resmi, dan berdasarkan anggaran dasarnya bukanlah partai komunis. Tapi SUPP diinfiltrasi oleh Sarawak Communist Organization (SCO) yang ilegal sehingga terwarnai komunis. Setelah diinfiltrasi SCO, hubungan PGRS dengan RRT mulai dijalin.

Penulis merasa tertarik dengan adanya kondisi dilematis yang dialami oleh PGRS-PARAKU atas kejadian-kejadian yang terjadi di pulau Kalimantan dari tahun 1963-1974, dari yang tadinya kawan bagi Indonesia untuk mengganyang Malaysia hingga pada akhirnya menjadi lawan yang diganyang oleh Indonesia dan Malaysia. Alasan penulis mengambil rentang tahun 1963-1974 dikarenakan lahirnya PGRS-PARAKU di tahun 1963 dan pada tahun 1974 itu menjadi masa akhir PGRS-PARAKU sebagai lawan bagi Indonesia dan Malaysia, dengan ditandatanganinya suatu perjanjian perdamaian.

Pengkajian mengenai sejarah di daerah perbatasan dewasa ini pada kenyataannya masih kurang banyak digali oleh kalangan akademisi maupun masyarakat umum,

Dika Nugraha, 2017

PASUKAN GERILYA RAKYAT SARAWAK-PASUKAN RAKYAT KALIMANTAN UTARA (PGRS-PARAKU) DI KALIMANTAN BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

khususnya di pulau Kalimantan. Wilayah tersebut yang mencakup antara Indonesia dengan Malaysia. Selain itu pulau Kalimantan juga menjadi wilayah yang dilalui orang-orang Tiongkok melewati Laut China Selatan. Penulis mengambil ruang lingkup penelitian di Kalimantan Barat karena subjek yang penulis teliti terkait dengan eksistensi PGRS-PARAKU yang dibentuk di daerah Kalimantan Barat, salahsatu wilayah Indonesia di pulau Kalimantan yang mana sumber sejarahnya dinilai masih sangat terbatas.

Penulis mengharapkan dengan adanya penulisan penelitian ini, maka akan menjadi salahsatu sumber bacaan bagi pembaca untuk lebih memahami situasi, kondisi, serta akar permasalahan tentang dilematisnya eksistensi PGRS-PARAKU yang ternyata telah mewarnai pulau Kalimantan. Berkaitan dengan keresahan-keresahan penulis tersebut dan keingintahuan lebih jauh lagi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak-Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS-PARAKU) di Kalimantan Barat: dari Kawan sampai Lawan bagi Indonesia tahun 1963-1974”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok-pokok pikiran yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, muncul satu pertanyaan utama yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses PGRS-PARAKU dari kawan sampai lawan bagi Indonesia tahun 1963-1974 terkait dengan situasi politik di Indonesia?”, sedangkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka penulis membatasi dalam beberapa pertanyaan berikut ini.

1. Apakah yang melatarbelakangi pembentukan PGRS-PARAKU?
2. Bagaimanakah kebijakan Indonesia terhadap PGRS-PARAKU pada masa Orde Lama?
3. Mengapa terjadi perubahan kebijakan Indonesia terhadap PGRS-PARAKU?
4. Bagaimanakah kondisi akhir gerakan-gerakan PGRS-PARAKU pasca perubahan kebijakan Indonesia (Orde Baru)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “proses PGRS-PARAKU dari kawan sampai lawan bagi Indonesia tahun 1963-1974 terkait dengan situasi politik di Indonesia”. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami latar belakang pembentukan PGRS-PARAKU.
2. Menggali informasi mengenai kebijakan awal Indonesia yang pro terhadap PGRS-PARAKU.
3. Menganalisis perubahan kebijakan Indonesia terhadap PGRS-PARAKU.
4. Menggali informasi mengenai kondisi akhir dari gerakan-gerakan PGRS-PARAKU pasca perubahan kebijakan Indonesia (Orde Baru).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki sumbangsih besar terhadap beberapa pihak yang terkait, baik itu pihak yang terjun langsung ataupun pihak yang tidak langsung berada dalam penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Praktis. Adapun manfaat praktis dari seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh yaitu dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai salahsatu gerakan yang ada di wilayah perbatasan pulau Kalimantan.
2. Manfaat Akademis. Adapun manfaat akademis yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu dapat dijadikan referensi/rujukan bagi mahasiswa yang melakukan kajian yang sama terhadap materi PGRS-PARAKU. Selanjutnya, diharapkan juga dapat digunakan dalam salahsatu materi dalam mata kuliah sejarah lokal, karena materi ini cukup menarik untuk dipelajari. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengembangan materi pembelajaran sejarah di sekolah pada kajian masa Demokrasi Terpimpin nya Soekarno dan masa awal Orde Baru nya Soeharto.

1.5 Metode Penelitian

Dika Nugraha, 2017

PASUKAN GERILYA RAKYAT SARAWAK-PASUKAN RAKYAT KALIMANTAN UTARA (PGRS-PARAKU) DI KALIMANTAN BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam penelitian ini digunakan metode historis. Metode historis merupakan metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini karena data-data yang dibutuhkan menyangkut dengan masa lampau (Widja, 1988, hlm. 19). Louis Gottchalk (1983, hlm. 32) menjelaskan metode sejarah sebagai suatu proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

Secara lebih ringkas, setiap langkah ini berturut-turut bisa juga diistilahkan dengan: Heuristik, Kritik atau verifikasi, *Aufassung* atau Interpretasi, dan *Darstellung* atau Historiografi (Abdurrahman, 1999, hlm. 44). Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan beberapa langkah penting dalam menyusun skripsi ini. Langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Heuristik, yaitu tahap pertama dalam penelitian sejarah dimana dikumpulkanlah sumber-sumber. Pada tahap ini penulis mulai menentukan dan mencari sumber baik berupa sumber tertulis maupun sumber lisan.
2. Kritik, yaitu menguji dan menilai keotentikan data yang didapatkan apakah sesuai dengan masanya atau tidak. Kritik sumber terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal.
3. Interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap kajian sejarah yang sedang diteliti berdasarkan data yang telah didapatkan pada tahap heuristik dan dinyatakan telah otentik setelah melalui tahap kritik sumber.
4. Historiografi, yaitu tahap terakhir dalam penelitian sejarah dimana penulis mengungkapkan hasil penelitiannya ke dalam bentuk tulisan sebelum akhirnya dikaji oleh pembaca.

Penulis membagi tahap-tahap dalam metode penelitian ini, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan sampai kepada tahap penyusunan laporan hasil penelitian. Adapun teknik yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kepustakaan, dimana dipelajari data-data atau catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mempelajari buku-buku, atau literatur lain untuk memperoleh informasi yang relevan.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini merujuk pada sistematika penulisan skripsi yang ada dalam Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2015. Buku tersebut sebagai panduan dan pedoman penulisan karya ilmiah termasuk skripsi bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang digunakan merupakan versi terbaru yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini secara garis besar penulis memaparkan masalah yang dikaji. Adapun di dalam Bab I ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penggunaan sumber-sumber atau literatur oleh penulis, dimana berisi teori yang disesuaikan dengan variable penelitian, selanjutnya dibuat kerangka berpikir (teori dan konsep) agar penulisannya lebih terarah. Pada bab ini juga dijelaskan kajian penulis mengenai sumber-sumber yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III secara garis besar berisi penjelasan tentang metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Bab ini memaparkan tahapan-tahapan secara historis untuk menyelesaikan penelitian, yang terdiri dari tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV ini menjelaskan isi pokok dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Dalam bab ini penulis membahas tentang “Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak-Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS-PARAKU) di Kalimantan Barat:

dari Kawan sampai Lawan bagi Indonesia tahun 1963-1974”. Pada bab ini juga ditujukan untuk dapat menampilkan hasil analisis penulis terhadap kajian dalam penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi simpulan dari penulis mengenai kajian secara keseluruhan tentang “Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak-Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS-PARAKU) di Kalimantan Barat: dari Kawan sampai Lawan bagi Indonesia tahun 1963-1974 berdasarkan pespektif penulis secara akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada bab ini juga berisi rekomendasi atau saran dari penulis berkenaan dengan tindak lanjut penelitian ini maupun pemanfaatan lainnya.